

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan, pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi seperti penambangan batu ilegal. Rumusan masalah mengapa aparat penegak hukum tidak menindak pertambangan batu ilegal ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan dengan cara wawancara serta menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data dekriptif analisis.

Setelah di adakan penelitian pertambangan di kabupaten Sumenep Kecamatan Saronggi desa Kebundadap barat ternyata pertambangan tesebut masih terjadi dan tidak mengantongi izin meski telah terjadi longsor.

Terjadinya pertambnagan batu ilegal di sebabkan adanya massyarakat atas pengakuan bahwa pertambangan yang dilakukann adalah milik dia senidri tanah milik sendiri dan lemahnya penegakan hukum dinas terkait mengenai tindak pidana pertambangan batu ilegal.

Kalimat Kunci: Tindak pindana, pertambangan batu ilegal kabupaten Sumenep.

ABSTRACT

Law enforcement is one of the efforts to create order, security and peace in the community, whether it is prevention, eradication or action after the occurrence of a violation or crime such as illegal stone mining. The formulation of the problem why law enforcement officers do not take action against illegal stone mining?

This study uses a kind of sociological juridical research using the approach method by interview and using qualitative data analysis is a way of research analysis that produces descriptive data analysis.

After the mining research in the district Sumenep Kecamatan Saronggi village Kebundadap western mining mining is still happening and not pocketed the permit even though there has been a landslide.

The occurrence of illegal stone stakes in the cause of the existence of the community over the recognition that the mining is done belongs to him sendiri own land and the weakness of law enforcement related offices of illegal stone mining crime.

Key Words: Pindana, illegal stone mining of Sumenep regency.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Secara Teoritis.....	5
1.4.2 Secara Praktis	5
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Sumber Data	8
1.6.4 Lokasi Penelitian.....	9
1.6.5 Responden	9
1.6.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	9
1.6.7 Metode Analisi Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERTAMBANGAN BATU ILEGAL.	
2.1 Tinjauan Pustaka Tentng Penegakan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	11
2.1.2 Kebijakan Penegakan Hukum	13
2.1.3 Sistem Hukum	16
2.2 Pertambangan Batu Ilegal	17
2.2.1 Pengertian Pertambangan Batu Ilegal	17
2.2.2 Jenis-jenis Bahan Tambang.....	18
2.2.3 Unsur Delik Pidana Pertambangan Batu Ilegal.....	21
2.2.4 Tujuan Pemidanaan dan pertanggungjawaban Pidana	27
BAB III UPAYA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATU ILEGAL DI KABUPATEN SUEMENEP.	
3.1 Lokasi Penelitian	31
3.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pertambangan Batu Ilegal	35
3.3 Tindakan Yang Dilakukan oleh Penegak Hukum Pertambangan Hukum Pertambangan Batu Ilegal	43

3.4 Upaya-upaya Penegak Hukum terhadap Pertambangan Batu Ilegal	46
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
BIODATA PENULIS	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Areal pertambangan golongan C menurut desa dan jenis hasil tambang	32
Tabel 2 Rekapitulasi data penduduk menurut pekerjaan desa Kebundadap Barat	36
Tabel 3 Daftar jenis usaha dan kegiatan yang telah dimiliki dokumem UKL-UPL kabupaten Suemenep	39
Tabel 4 Data pertambangan batu di kabupaten Sumenep Dinas Energi Sumber Daya Alam	40